

**STUDI KASUS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN OLEH  
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK  
(Studi kasus Nomor 104/Pid.SUS/2024/PN Adl)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana*

**Oleh:**

**RAHMATUL IKHWATI**

**2110112032**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Tenofrimer, S.H.,M.H  
Yandriza, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 01/PK. IV/I/2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM  
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK  
(Studi kasus Nomor 104/Pid.SUS/2024/PN Adl)**

*Rahmatul Ikhwati, 2110112032, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Halaman Tahun 2025, Pembimbing  
Tenofrimer, S.H., M.H. dan Yandrizza, S.H., M.H.*

**ABSTRAK**

Peran surat dakwaan sangat penting dalam suatu proses penuntutan perkara pidana di forum pengadilan dalam rangka penegakkan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak termasuk terdakwa yang merupakan tugas dan tanggung jawab seorang Jaksa Penuntut Umum. Dalam membuat surat dakwaan jaksa penuntut umum harus berhati-hati dan cermat dalam membuat surat dakwaan, Jaksa harus memeriksa berkas perkara dengan cermat dan penuh ketelitian apakah perkara tersebut layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak layak karena tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup sebagaimana telah diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b dan pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu menjadi perhatian bagi Peneliti untuk mengkaji tentang surat dakwaan oleh penuntut umum ke pengadilan. Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap surat dakwaan oleh penuntut umum dalam tindak pidana penganiayaan pada perkara dengan putusan Nomor 104/Pid,Sus/2024/PN.AdL. 2) Bagaimana kendala Pembuktian dalam persidangan pada perkara Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN.AdL?. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian normatif yang didukung oleh data empiris dengan sumber data primer dan sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil dari penelitian Penulis ini adalah Surat Dakwaan dalam perkara ini belum memenuhi unsur kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penuntut umum menyusun dakwaan berdasarkan alat bukti yang secara kualitas dan relevansinya tidak saling berkesesuaian sehingga tidak saling menguatkan, karena perkara yang diajukan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak awal tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup sebagaimana dalam ketentuan 183 dan 184 ayat 1 (KUHAP) sehingga pada akhirnya Hakim memutus bebas terdakwa karena alat bukti minimal tidak terpenuhi sebagai dasar Hakim dalam memeriksa perkara. Kendala pembuktian perkara ini sejak awal disebabkan oleh lemahnya nilai pembuktian alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang mana hal ini juga mencerminkan kurang cermat dan kurang hati-hatinya jaksa dalam menilai perkara.

**Kata Kunci: Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Bukti Permulaan, Pembuktian**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE INDICTMENT BY THE PUBLIC  
PROSECUTOR IN THE CRIME OF CHILD ABUSE  
(Case Study No. 104/Pid.SUS/2024/PN Adl)**

*Rahmatul Ikhwati, 2110112032, Faculty of Law, Universitas Andalas, Criminal Law  
Specialization Program (PK IV), Page Year 2025, Supervisors: Tenofrimer, S.H.,  
M.H. and Yandrizza, S.H., M.H.*

**ABSTRACT**

The role of an indictment is highly important in the prosecution process of criminal cases in court to ensure fair law enforcement for all parties, including the defendant, which is the duty and responsibility of a Public Prosecutor. In drafting an indictment, the Public Prosecutor must exercise caution and accuracy, carefully examining the case files to determine whether the case is eligible to be brought to court or should not be transferred due to insufficient evidence, as stipulated in Article 143 paragraph (2) letter b and Article 183 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Therefore, this matter has drawn the Researcher's attention to examine the indictment by the public prosecutor to the court. The research questions in this study are: (1) What is the juridical analysis of the indictment by the public prosecutor in the crime of abuse in Case Decision Number 104/Pid.Sus/2024/PN.AdI? (2) What are the evidentiary challenges in the trial of case number 104/Pid.Sus/2024/PN.AdI? To address these issues, the researcher applied normative legal research methods supported by empirical data from primary and secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research shows that the indictment in this case does not meet the element of accuracy as stipulated in article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The public prosecutor prepared the indictment based on evidence that in terms of quality and relevance, was not consistent and did not support one another, since the transfer of the case to court by the Public Prosecutor was not based on sufficient evidence from the outset, as required by Articles 183 and 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, leading the Judge to acquit the defendant due to the failure to meet the minimum evidence requirement as the basis for judicial examination. The evidentiary challenges in this case from the outset were caused by the weak probative value of the evidence presented by the public prosecutor, which also reflect the presecutor's lack of accuracy and prudence in assesing the case.

**Keywords: Indictment, Public Prosecutor, Preliminary Evidence, Evidentiary process**